

**BISNIS MILITER DI THAILAND PASKA KRISIS
EKONOMI ASIA TAHUN 1998-2004**

RESUME



Disusun oleh :

Budi Septiawan (151040062)

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2011

BISNIS MILITER DI THAILAND PASKA KRISIS EKONOMI ASIA TAHUN 1998-2004

RESUME

Krisis ekonomi di Thailand merupakan krisis ekonomi yang pertama kali melanda kawasan Asia. Krisis ekonomi Asia bermula pada bulan Juli tahun 1997 di Thailand, kejadian ini dilatarbelakangi oleh keputusan pemerintahan PM Chavalith Yongchayud yang mengembangkan nilai tukar mata uang dan mengakibatkan menurunnya suku bunga mata uang bath Thailand atas mata uang dollar Amerika, dengan nilai tukar 56 bath per dolar nya.

Selain bidang ekonomi, krisis juga memasuki bidang politik melalui perubahan konstitusi dan pergantian pemerintahan berdasarkan tuntutan rakyat Thailand yang menginginkan konstitusi di reformasi dan pemerintahan diganti. Karena rakyat menilai konstitusi yang dibuat oleh junta militer pada tahun 1992 tidak demokratis dan dianggap menutup partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, serta penanganan akan krisis ekonomi yang dinilai masyarakat berjalan lambat membuat penggantian pemerintahan menjadi tuntutan utama.

Peran militer dalam bisnis pada masa sebelum demokrasi di Thailand, awalnya merupakan sebuah hak istimewa bagi kelembagaan militer yang sebelumnya merupakan bagian dari pemerintahan Thailand. Sebagaimana diketahui militer pun turut membantu pembangunan negara dalam bidang ekonomi pada pemerintahan

yang otoriter. Seperti yang terjadi di Thailand pada masa awal pemerintahan Chavalith Yongchaiyud, pemerintahan militer membuat pembangunan negara meningkat sebelum terjadinya krisis ekonomi, sehingga sempat dijuluki “Macan Asia”.

Kondisi ekonomi dan politik di beberapa negara Asia Tenggara pada saat terjadinya krisis ekonomi tersebut cukup berpengaruh terhadap jalannya bisnis militer Thailand, karena beberapa perusahaan yang mereka miliki terkena dampak dari krisis. Selain itu militer juga memilih untuk mendukung reformasi konstitusi yang menyebabkan banyak kepentingan bisnis militer terpotong, karena militer ingin melihat usaha-usaha pemulihan krisis ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan koalisi yang baru pimpinan PM Chuan Leekpai. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut berupa kebijakan politik dan ekonomi yaitu, perubahan konstitusi, pergantian pemerintah, koalisi partai politik, kerjasama dengan IMF dan kebijakan ekonomi *Thaksinomics*.

Upaya yang dilakukan militer untuk mempertahankan bisnisnya paska krisis ekonomi Asia 1997 dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, dapat dilihat dengan penjualan aset-aset usahanya kepada pihak lain. Seperti halnya, militer menyerahkan pengelolaan sebagian usahanya kepada pihak pengusaha swasta, dengan cara pergantian kepemilikan usaha, peralihan kekuasaan atas aset-aset bisnisnya dan transparansi keuntungan dari aset-aset bisnis yang dimiliki militer. Serta militer memberikan sebagian aset bisnisnya kepada pemerintah dengan cara diprivatisasikan

oleh pemerintah dan membeli saham perusahaan yang dianggap cukup strategis. Di Thailand terdapat sejumlah aset milik negara yang pada sebelum krisis lebih banyak dikuasai militer, mulai dari sektor telekomunikasi, transportasi, perbankan (seperti pada Bank Thai Farmer, Bangkok Bank, Thailand Military Bank, dll), pelabuhan, sampai jasa di bandar Udara (Thai Airlines). Saat ini sebagian besar perusahaan tersebut telah di nasionalisasikan oleh pemerintah sipil, karena beberapa perusahaan tersebut merupakan aset strategis negara, sehingga harus dipegang kembali oleh negara.

Eksistensi militer dalam bisnis pada masa paska krisis ekonomi 1997 di Thailand sempat terganggu, bahkan beberapa perusahaan milik militer mengalami kebangkrutan karena terkena dampak dari krisis tersebut dan membuat militer harus mereformasi dan merestrukturisasi bidang usahanya. Dengan melakukan restrukturisasi dan reformasi diharapkan mampu bertahan dari pengaruh krisis ekonomi. Contohnya dengan penjualan perusahaan, pergantian pemilik dan di nasionalisasi kembali oleh negara melalui kordinasi dari departemen pertahanan.

Mengapa militer tetap mempertahankan bisnisnya adalah karena pengaruh dari sikap dan peranan pemerintah reformasi Thailand yang mampu mengatasi krisis ekonomi dengan cepat sehingga perusahaan-perusahaan milik militer yang terkena krisis mengalami kemajuan secara signifikan menuju ke kondisi yang lebih baik. Meskipun reformasi ekonomi awalnya berjalan lambat dari 1998 sampai 2004, tetapi berkat dukungan rakyat, elit dan militer di dalamnya program perubahan ekonomi

berhasil secara sempurna. Pemerintah sendiri telah menyadari bahwa bisnis yang dilakukan militer ini sedikit banyak mempengaruhi profesionalitasnya sebagai pelindung negara. Untuk itu di Thailand pemerintah berupaya membatasi dan membenahi bisnis militer sehingga militer hanya difokuskan pada bidang keamanan dan pertahanan negara.

Perubahan politik dalam negeri yang terjadi paska krisis ekonomi membuat militer ikut meresponnya dengan melakukan reformasi sektor keamanan di dalam tubuh militer. Keadaan politik yang lebih demokratis membatasi peran politik dari militer dan pemerintah menginginkan militer menjadi lebih profesional. Selain itu, pengaturan aset dan penyesuaian anggaran pertahanan mempengaruhi sikap militer salah satunya dengan penataan bisnis militer. Kebijakan reformasi sektor keamanan tersebut meliputi:

- meningkatkan profesionalitas, transparansi, memusatkan proses pengadaan persenjataan dan logistik militer pada level kementerian;
- privatisasi dan restrukturisasi unit-unit usaha termasuk di dalamnya sektor bisnis militer dan tugas-tugas yang terseleksi, serta reformasi sistem cadangan (komponen cadangan-wajib militer);
- Riset dan pengembangan alat-alat dan kemampuan tempur angkatan bersenjata.

Dalam reformasi sektor keamanan di Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand (*The Royal Thai Armed Forces*), fokusnya adalah tentang postur pertahanan, kesiapan tempur, militer yang lebih responsive dan fleksibel, dan suatu sistem baru komponen cadangan. Semua tujuan ini hendak menciptakan suatu angkatan bersenjata yang lebih modern dan profesional, dengan tugas utama pertahanan negara dan tugas-tugas lainnya yang dimandatkan oleh konstitusi. Rencana reformasi ini diteruskan di dalam 3 fase yang lebih dari 12 tahun. Fase pertama, dalam 2 tahun pertama, fase kedua, diperluas dalam 5 tahun, dan fase terakhir juga dalam waktu 5 tahun. Rencana itu diharapkan dievaluasi dan ditinjau kembali di setiap tahap. Keseluruhan rencana tersebut akan mengurangi lebih dari 72.000 personel.

Sejalan dengan kebijakan reformasi sektor keamanan, pemerintah merencanakan pengembangan bisnis militer kearah industri melalui lembaga yang ada dengan pengawasan dari Departemen Pertahanan. Maksud dan tujuan dari rencana ini adalah membuat militer mempunyai kemampuan sendiri dalam mengatasi kekurangan anggaran dikarenakan inti dari reformasi ini menuntut terciptanya sikap profesionalitas angkatan bersenjata. Sehingga kegiatan bisnis militer yang selama ini terjadi berubah haluan menjadi lebih tertata dalam satu koridor saja yaitu industri pertahanan. Selain itu juga membuat terciptanya kemandirian dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista, dengan mengurangi pembelian senjata impor dari luar dan cenderung memakai buatan dalam negeri.

Program industrialisasi pertahanan ini dinilai cukup mampu menunjang dari segi pengadaan peralatan di tengah minimnya anggaran. Pengembangan industri ini juga sejalan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang mengandalkan sektor industri untuk membangun kembali ekonomi nasional keluar dari krisis ekonomi. Sampai tahun 2011 terdapat sekitar 48 bahkan lebih perusahaan yang bergerak dibidang industri pertahanan yang berada di bawah wewenang Departemen Pertahanan. Hasil-hasil yang dicapai sektor industri ini cukup mampu menunjang kebutuhan angkatan bersenjata dari segi peralatan dan perawatannya. Kekhawatiran tentang adanya penurunan kualitas pertahanan yang dikarenakan penyesuaian anggaran pertahanan tak terlalu dirasakan, karena sektor industri pertahanan juga mampu menutupi sekitar 2,0 persen kekurangan yang didapat dari anggaran pertahanan. Sehingga adanya industri pertahanan ini mampu menjadi solusi bagi militer untuk tetap bertahan dalam usahanya menutupi kekurangan anggaran lewat bisnis militer.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bisnis militer paska krisis tetap berlangsung dengan didukung oleh adanya kebijakan secara politik dan ekonomi dari pemerintah maupun adanya kebijakan reformasi sektor keamanan dalam internal militer. Meskipun membuat bisnis yang dijalankan militer harus berganti haluan dan merubah sistem yang ada sebelumnya.